

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait implementasi Program SALAM (Skrining Anak Dalam Masalah) sebagai deteksi dini penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar di Kota Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan dari empat variabel sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam implementasi Program SALAM pada alur penyampaian informasi dimulai dari koordinasi internal di BNN Kota Surabaya, lalu dilanjutkan melalui surat resmi ke sekolah, audiensi, sampai komunikasi teknis menjelang pelaksanaan skrining. Pola ini menunjukkan bahwa proses transmisi pesan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan dirancang terstruktur. Dari sisi kejelasan, tujuan program juga sudah disampaikan sejak awal sebagai upaya deteksi dini dan perlindungan siswa, bukan untuk memberi label negatif. Penjelasan terkait mekanisme skrining, penggunaan instrumen ASSIST, hingga tindak lanjut hasil pun dikomunikasikan secara terbuka sehingga mampu mengurangi potensi salah paham. Meski begitu, pada tahap penerimaan pesan masih terlihat variasi respons. Beberapa sekolah bersikap terbuka dan langsung menerima program, sementara yang lain masih ragu atau belum memberikan izin. Selain itu, keterbukaan siswa saat proses skrining juga belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi faktor psikologis seperti rasa takut, malu, dan kekhawatiran terhadap stigma. Jadi, bisa dipahami bahwa secara

struktur komunikasi Program SALAM sudah sistematis dan jelas, tetapi efektivitasnya di lapangan tetap sangat bergantung pada kesiapan, persepsi, dan penerimaan dari pihak sekolah serta kondisi psikologis siswa sebagai sasaran program.

2. Dari sisi sumber daya, Program SALAM dalam pembagian peran antara tim rehabilitasi dan tim P2M sudah jelas. Tim rehabilitasi bertanggung jawab pada proses skrining dan analisis hasil, sementara tim P2M fokus pada sosialisasi dan edukasi. Di tingkat sekolah, guru BK atau perwakilan sekolah juga dilibatkan sebagai pendamping. Pada aspek informasi, penggunaan instrumen ASSIST menunjukkan bahwa program ini memiliki dasar teknis yang terstandar dan sistematis. Selain itu, program juga telah mengacu pada regulasi nasional dan peraturan daerah yang memperkuat legitimasi pelaksanaannya. Dari sisi kewenangan, BNN memiliki otoritas dalam pelaksanaan teknis skrining dan rekomendasi rehabilitasi, sementara sekolah berperan dalam pendampingan dan koordinasi dengan orang tua. Pembagian ini cukup jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran. Fasilitas pendukung seperti ruang konseling, instrumen asesmen, dan media sosialisasi juga tersedia. Jadi, secara internal sumber daya sudah memadai, tetapi implementasinya tetap dipengaruhi oleh kesiapan mitra sekolah.
3. Variabel disposisi menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana relatif positif. Tim BNN memandang SALAM sebagai program pencegahan yang mengedepankan pendekatan humanis, sehingga arahan pimpinan tentang komunikasi persuasif dan kerahasiaan data benar-benar diterapkan saat proses

skrining. Sebagian sekolah juga menunjukkan dukungan, terlihat dari keterlibatan guru BK dalam mendampingi siswa. Ketika ada sekolah yang masih ragu atau menolak, tim BNN tidak langsung menghentikan pelaksanaan, tetapi justru memperkuat komunikasi dan melakukan pendekatan secara bertahap agar tujuan program tetap dapat dipahami. Walaupun resistensi dari sebagian sekolah masih ada, secara umum sikap pelaksana tetap menunjukkan kemauan, kesungguhan, dan komitmen yang kuat untuk menjalankan program sesuai dengan tujuan kebijakan secara berkelanjutan.

4. Dari sisi struktur birokrasi, Program SALAM telah memiliki pedoman dan SOP sebagai acuan pelaksanaan. Alur kerja antara BNN dan sekolah juga sudah jelas, mulai dari tahap koordinasi, sosialisasi, skrining, hingga tindak lanjut hasil. Program ini juga didukung oleh regulasi yang memperkuat dasar hukumnya di sektor pendidikan. Artinya, secara administratif dan normatif, struktur pelaksanaan sudah tersedia. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan tetap sangat bergantung pada persetujuan dan kesiapan sekolah. SOP memang membantu mengatur mekanisme kerja, tetapi tidak sepenuhnya mampu mengatasi faktor eksternal seperti kekhawatiran atau kebijakan internal sekolah. Dengan kata lain, struktur birokrasi sudah memadai secara formal, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kerja sama lintas institusi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program SALAM (Skrining Anak dalam Masalah) sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Surabaya sudah memiliki landasan yang kuat secara konseptual, normatif, dan struktural, tetapi dalam

praktiknya masih menghadapi dinamika sosial dan institusional yang membuat pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Sejak awal perumusan masalah, penelitian ini berangkat dari urgensi meningkatnya kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba serta kebutuhan akan pendekatan pencegahan dan penanganan yang lebih preventif dan berbasis lingkungan pendidikan, sehingga Program SALAM menjadi kebijakan yang relevan karena menempatkan sekolah sebagai ruang strategis deteksi dini. Secara teoretis, implementasi program ini dapat dipahami melalui kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dengan demikian, implementasi Program SALAM sebagai kebijakan deteksi dini penyalahgunaan narkoba pada pelajar SD dan SMP di Kota Surabaya secara umum telah berjalan secara formal, terstruktur, dan sesuai dengan kerangka kebijakan yang ada, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti perizinan dalam pelaksanaan program SALAM ke sekolah dan kekhawatiran siswa yang takut pada dampak kedepannya. Ketercapaian tujuan program tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, SOP, dan kesiapan pelaksana, melainkan sangat bergantung pada pelaksanaan komunikasi kepada sasaran, ketersediaan dan fleksibilitas sumber daya, komitmen serta sensitivitas pelaksana, serta dukungan aktif dari pihak sekolah sebagai mitra utama. Secara substansial, temuan ini menguatkan asumsi teori Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan merupakan hasil interaksi simultan antarvariabel, bukan hanya ditentukan oleh satu faktor saja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan mengenai implementasi Program SALAM (Skrining Anak Dalam Masalah) di Kota Surabaya, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. BNN Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif dan edukatif kepada pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Sosialisasi untuk program SALAM lebih ditambah lagi untuk diperkenalkan pada masyarakat dan sebaiknya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dikemas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami agar mengurangi stigma dan rasa takut terhadap proses skrining.
2. Perlu adanya penguatan kerja sama yang lebih intens dengan pihak sekolah. Tidak semua sekolah memiliki tingkat kesiapan yang sama, sehingga pendekatan yang fleksibel dan dialogis penting dilakukan agar sekolah merasa dilibatkan, bukan hanya sebagai objek program.
3. Dalam pelaksanaan skrining, disarankan agar metode pendekatan kepada siswa terus dibuat lebih humanis dan nyaman. Suasana yang tidak kaku dan jaminan kerahasiaan perlu terus ditekankan supaya siswa lebih terbuka dan jujur saat proses wawancara berlangsung.
4. Dari sisi kelembagaan, BNN dapat memperluas jangkauan pelaksanaan Program SALAM dengan perencanaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjangkau sekolah tertentu saja, tetapi merata di lebih banyak sekolah.

5. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat mengkaji Program SALAM dengan cakupan informan yang lebih luas, seperti melibatkan lebih banyak sekolah dan orang tua, agar gambaran implementasi program menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Dengan begitu, evaluasi program tidak hanya dilihat dari sisi pelaksana, tetapi juga dari pengalaman langsung para sasaran kebijakan.